



RENCANA KERJA 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Disperka Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2022 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu, Tujuan dan capaian Renstra OPD, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Renja sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerjanya.

Mojokerto, Agustus 2021

Pit. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Dis. MOKHAMAD RIDUWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19721026 199201 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	11
Tabel 2.2	20
Tabel 2.3	22
Tabel 2.4	32
Tabel 3.1	35
Tabel 3.2	38
Tabel 4.1	

46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 merupakan dokumen resmi daerah yang diperuntukkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Selain itu, Renja PD ini mempunyai fungsi penting yang mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat pengguna.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2022, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional maupun Propinsi Jawa Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menjadi

unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Mojokerto.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerton Tahun 2019 Nomor 4) ;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1) ;
 32. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
 33. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/048/416-117/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pelayanan bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Bidang Pengembangan

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Perpustakaan dan kearsipan, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja PD, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.

Subbab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindakluti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program kegiatan yang cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, Program dan kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat

tertentu.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2023.

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2020 sebesar 83,40 % sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 4.902.706.400
Pengurangan APBD	<u>Rp. 730.197.820</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 4.172.508.580
Realisasi	<u>Rp. 3.479.703.884</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 692.804.696</u>

Sedangkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2021 adalah sebesar Rp. 5.660.106.497,-.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
(Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg s/d dgn Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan keg (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Th (n- 2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Th (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog dan Keg s/d th berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
2 17 2 1 0 0 0 0 7 1 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah			389.731.550	336.922.744	86,44			
2 17 2 1 0 0 0 0 7 1 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	-	160.000.000	132.703.864	82,94	12 Bulan	12 Bulan	50%
2 17 2 1 0 0 0 0 7 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	-	-	13.500.000	6.620.700	49,04	12 Bulan	12 Bulan	50%
2 17 2 1 0 0 0 1 7 1 1 0	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yg tersedia	-	-	27.332.900	27.242.800	99,67	12 Bulan	12 Bulan	50%

2	17	2	1	0	0	0	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopy yg tersedia	-	-	7.318.750	7.125.000	97,35	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	-	-	85.475.000	73.650.000	86,17	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yg tersedia	-	-	13.002.500	10.057.500	77,35	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dlm dan luar drh	-	-	30.000.000	28.535.000	95,12	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	2	Penyediaan Jasa Tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja kontrak yg tersedia	-	-	53.102.400	50.987.880	96,02	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	-	-	140.000.000	126.154.795	90,11			
2	17	2	1	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg direhabilitasi	-	-	72.000.000	65.634.795	91,16	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara	-	-	45.000.000	38.420.000	85,38	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yg dipelihara	-	-	23.000.000	22.100.000	96,09	12 Bulan	12 Bulan	50%
2	17	2	1	0	0	0		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peleporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	-	-	7.000.000	7.000.000	100			

2	17	2	1	0	0	0	0	Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersedia	-	-	7.000.000	7.000.000	100	12 Bulan	12 Bulan	50
2	17	2	1	0	0	1		Program Perpustakaan		-	-	62.992.000	60.992.000	96,82			
2	17	2	1	0	0	1	0	Lomba Bercerita & Menulis Asal Usul Desa		-	-	14.955.000	14.955.000	100	Jumlah Peserta	0	-
2	17	2	1	0	0	1	0	Pembinaan Perpustakaan		-	-	18.200.000	18.200.000	100	Jumlah Peserta	956 Orang	956&
2	17	2	1	0	0	1	0	Lomba Duta Baca Remaja		-	-	0	0	0	Jumlah Peserta	0	
2	17	2	1	0	0	1	0	Pemberdayaan Minat Baca (Pustaka Jemput Bola)				27.272.000	25.272.000	92,67	Jumlah Lokasi	16 lokasi	32%
2	17	2	1	0	0	1	0	Pendirian Perpustakaan Desa dlm rangka TMMD				2.565.000	2.565.000	100	Jumlah Desa Penerima bantuan	0	
2	17	2	1	0	0	1		Program Pengembangan		-	-	95.307.750	94.194.000	98,83			
2	17	2	1	0	0	1	0	Kegiatan Pengembangan koleksi Perpustakaan		-	-	33.647.000	33.579.000	99,80	Jumlah Buku yang dibeli	368 Eks	36,80%
2	17	2	1	0	0	1	0	Kegiatan Pelestarian bahan pustaka local dan perbaikan bahan pustaka		-	-	22.780.750	21.825.000	95,80	Jumlah Bahan Pustaka yang dipelihara	35 Eks	116%
2	17	2	1	0	0	1	0	Pelaksanaan Pustaka Terapan untuk peningkatan pengetahuan dan		-	-	38.880.000	38.790.000	99,77	Jumlah Peserta	171 Orang	34,20%

							keترampilan masyarakat									
2	17	2	1	0	0	1	Program Kearsipan		-	-	80.391.000	79.902.000	99,39			
2	17	2	1	0	0	1	Sosialisasi dan pembinaan Kearsipan		-	-	0	0	0	Jumlah OPD	-	-
2	17	2	1	0	0	1	Monitoring dan Evaluasi tata kelola kearsipan		-	-	15.743.500	15.743.000	100	Jumlah OPD	10 OPD	17,85%
2	17	2	1	0	0	1	Pemeliharaan , Perawatan dan pengamanan arsip statis		-	-	0	0	0	Jumlah arsip yang dirawat	-	-
2	17	2	1	0	0	1	Penyusunan/penyempurnaan peraturan/pedoman standart pelaksanaan tata kelola kearsipan		-	-	14.712.500	14.712.500	100	Jumlah Peraturan yang ditetapkan	7 Urusan	70%
2	17	2	1	0	0	1	Penyusunan arsip in aktif		-	-	49.935.000	49.446.500	99,02	Umlah OPD	9 OPD	180%

Pada tahun anggaran 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan sebanyak 6 Program dan 24 kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Disperka, dimana 3 program diantaranya merupakan program rutin penunjang administrasi kantor.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Disperka Kabupaten Mojokerto ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai, dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai Tahun 2020 sebesar Rp. 3.397.086.280,- (Tiga Milyar tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.774.538.345,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau 81,67%.

2. Belanja langsung

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 132.703.864,- atau 82,94 %. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a) Penyediaan listrik selama 12 Bulan

b) Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon dan internet selama 12 Bulan.

b. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.620.700,- atau 49,04%. Kegiatan ini digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor (operasional/dinas) baik roda 4 maupun roda 2 (3 unit roda 2 dan 6 unit roda 4).

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.332.900,- dan telah terrealisasi sebesar Rp. 27.242.800,- atau 99,67%. Kegiatan ini digunakan untuk pembelian ATK dan materai.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.318.750,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.125.000,- atau 97,35%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan/fotocopy (cetak amplop dinas, kertas kop, kartu kendali, lembar disposisi, map dinas).

e. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.475.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 73.650.000,- atau 86,17%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 13.002.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.057.500,- atau 77,35%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu.

g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.535.000,- atau 95,12%. Kegiatan ini digunakan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah.

h. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 53.102.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.987.880,- atau 96,02%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan jasa tenaga kerja sebanyak 5 (lima) orang.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 72.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 65.634.795,- atau 91,16%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 38.420.000,- atau 85,38%. Kegiatan ini digunakan untuk service kendaraan dinas / operasional, pembelian BBM, oli dan suku cadang.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.100.000,- atau 96,09%. Kegiatan ini digunakan untuk Service AC, Komputer dan Printer.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan pembelian alat tulis kantor..

4) Program Perpustakaan

- a. Kegiatan Lomba Bercerita & menulis Asal-usul Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.955.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.955.000,- atau 100%. Kegiatan ini sedianya digunakan untuk Lomba tetapi pada Bulan April mengalami Refocusing karena Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- b. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.200.000,- atau 100%. Kegiatan ini sedianya digunakan untuk pembinaan perpustakaan tetapi pada bulan April mengalami refocusing karena Pandemi Covid 19 sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan secara Daring/Zoom Meeting.
- c. Lomba Duta Baca Remaja
Kegiatan ini mengalami Refocusing karena Pandemi Covid 19 sehingga dananya Rp. 0,-
- d. Pemberdayaan Minat Baca (Pustaka Jemput Bola)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.272.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.272.000,- atau 92,67%. Kegiatan ini digunakan untuk Perpustakaan Keliling.
- e. Pendirian Perpustakaan Desa dlm rangka TMMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.565.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.565.000,- atau 100%. Kegiatan ini sedianya digunakan untuk memberikan bantuan kepada desa lokasi

TMMMD tetapi pada bulan April mengalami refocusing karena Pandemi Covid 19.

5) Program Pengembangan

- a. Kegiatan Pengembangan koleksi perpustakaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 33.647.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.579.000,- atau 99,80%. Kegiatan ini digunakan untuk Pengadaan buku.
- b. Kegiatan Pelestarian bahan pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.780.750,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.825.000,- atau 95,80%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan buku.
- c. Pelaksanaan pustaka terapan untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.880.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 38.790.000,- atau 99,77%. Kegiatan ini digunakan untuk Workshop

6) Program Kearsipan

- a. Sosialisasi dan Pembinaan Kearsipan
Kegiatan ini mengalami Refocusing karena Pandemi Covid 19 sehingga dananya Rp. 0,-
- b. Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.743.500,- dan telah teralisasi sebesar Rp. 15.743.000 atau 99,77%. Kegiatan ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan ke OPD.
- c. Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip statis
Kegiatan ini mengalami Refocusing karena Pandemi Covid 19 sehingga dananya Rp. 0,-
- d. Penyusunan/penyempurnaan peraturan/pedoman standart pelaksanaan tata kelola kearsipan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.712.500,- dan telah teralisasi sebesar Rp. 14.712.500 atau 100%. Kegiatan ini digunakan untuk menyusun Peraturan tentang Tata Kelola Kearsipan.
- e. Penyusutan arsip in aktif

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.935.000,- dan telah teralisasi sebesar Rp. 49.446.500 atau 99,02%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusutan arsip in aktif.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Juncto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Disperka Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis DISPERKA Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Perpustakaan
 - a. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
 - b. Pengunjung Perpustakaan.
2. Urusan Kearsipan
 - a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku
 - b. Kegiatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan

Kinerja pelayanan yang dicapai Disperka Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperka Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.2
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-06/08)	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						CATATAN
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12			13
	I. Indikator Kinerja Kunci (PP-06/08)															
	Urusan Kearsipan															
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku			n/a	n/a	-	-	-		n/a	n/a	-	-	-		
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan			n/a	n/a	-	-	-		n/a	n/a	3	-	-		
	Urusan Perpustakaan															
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			n/a		27.000	27.000	28.000	29.000	28.678	30.417	31.124	31.675	31.956		
4	Pengunjung perpustakaan			n/a		32.000	33.000	34.000	35.000		41.624	30.402	34.473	34.450		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah :

1. Urusan Kearsipan
 - a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja
 - b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
 - c. Persentase pelayanan kearsipan
2. Urusan Perpustakaan
 - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - b. Indeks Kegemaran Membaca

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2022
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	4.956.956.497	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	4.932.256.497	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	94%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	94%	15.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	3 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	3 dokumen	7.500.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	7 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	7 dokumen	7.500.000	

Rencana Kerja 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.402.344.097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.402.344.097	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.393.844.097	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	4.393.844.097	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan yang Disusun	7 laporan	8.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan yang Disusun	7 laporan	8.500.000	
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	75,09	12.150.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	75,09	12.150.000	
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	30 stel	12.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	30 stel	12.150.000	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	167.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	167.500.000	
11	Penyediaan	Kab.	Jumlah	12 bulan		Penyediaan	Kab.	Jumlah Waktu	12 bulan		

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mojokerto	Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli		75.000.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mojokerto	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli		75.000.000	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	25.000.000	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	7.500.000	
14	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan ATK	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan ATK	12 bulan	35.000.000	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan penyeleng Rapat Koordinasi dan		25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	25.000.000	

			Konsultasi SKPD								
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Perentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	86%	225.262.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Perentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	86%	225.262.400	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	160.262.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	160.262.400	
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	5 orang	65.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	5 orang	65.000.000	
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	134.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	134.700.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Penyediaan BBM, Servis, Ganti Suku	12 bulan	15.300.000	

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		BBM, Servis, Ganti Suku Cadang Kendaraan			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Cadang Kendaraan			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	35.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan / perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 bulan	35.700.000	
22	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung / Kantor	12 bulan	36.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung / Kantor	12 bulan	36.000.000	
23	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 bulan	23.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 bulan	23.000.000	
24	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokerto			602.500.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokerto	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Indeks kegemaran	12	917.470.000	

								membaca	41		
25	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	1. Jumlah buku yang dibeli, 2. Jumlah Peserta 3. Jumlah bahan pustaka local dan perbaikan bahan pustaka	1000 e-book/eksemplar 100 Orang 20 eksemplar	225.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	4. Jumlah buku yang dibeli, 5. Jumlah Peserta 6. Jumlah bahan pustaka local dan perbaikan bahan pustaka	1000 e-book/eksemplar 100 Orang 20 eksemplar	539.970.000	
26	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah Buku yang Dibeli	1000 e-book	55.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	1. Jumlah Buku yang Dibeli 2. TIK Layanan Perpustakaan	1. 1000 e-book 2. 1 Paket	369.970.000	
27	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan yang Disusun	1 laporan	40.000.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan yang Disusun	1 laporan	40.000.000	
28	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Bahan Pustaka Lokal dan Perbaikan Bahan Pustaka	20 eksemplar	25.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Bahan Pustaka Lokal dan Perbaikan Bahan Pustaka	20 eksemplar	25.000.000	
29	Pembinaan	Kab.	Jumlah	100		Pembinaan	Kab.	Jumlah Peserta	100 orang		

	Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mojokerto	Peserta yang Mengikuti	orang	60.000.000	Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mojokerto	yang Mengikuti		60.000.000	
30	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Mojokerto	Jumlah Buku yang Dibeli	1.000 eksemplar	45.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Mojokerto	Jumlah Buku yang Dibeli	1.000 eksemplar	45.000.000	
31	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	1. Jumlah lokasi 2. Jumlah peserta 3. jumlah desa penerima bantuan	1.75 lokasi 2.490 Orang 3.2 desa	377.500.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah kegiatan Pembudayaan gemar Membaca	15 kali	377.500.000	
32	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Lokasi, Jumlah Peserta	75 lokasi, 75 orang	122.500.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Lokasi, Jumlah Peserta	75 lokasi, 75 orang	122.500.000	
33	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa Penerima Bantuan	2 desa	45.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa Penerima Bantuan	2 desa	45.000.000	

	Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota					
34	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Lomba	125 orang	100.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Lomba	125 orang	100.000.000	
35	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Kegiatan	300 orang	60.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Kegiatan	240 orang	60.000.000	
36	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Lomba Duta Baca	75 orang	50.000.000	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Lomba Duta Baca	50 orang	50.000.000	
37	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	50%	107.500.000	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	50%	107.500.000	
38	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah melaksanakan kearsipan yang benar	5 OPD	80.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah melaksanakan kearsipan yang benar	5 OPD	80.000.000	
39	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Lembaga yang	25 OPD	30.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Lembaga yang Dimonitoring	25 OPD	30.000.000	

			Dimonitoring								
40	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah OPD	5 OPD	50.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah OPD	5 OPD	50.000.000	
41	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Berkas yang Dipelihara	2.500 berkas	27.500.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Berkas yang Dipelihara	2.500 berkas	27.500.000	
42	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Berkas yang Dipelihara	2.500 berkas	27.500.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Berkas yang Dipelihara	2.500 berkas	27.500.000	
43	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	53%	30.000.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	53%	30.000.000	
44	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	30.000.000	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	30.000.000	
45	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang	3 peraturan	30.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	30.000.000	

	Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Ditetapkan			Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					
TOTAL					5.696.956.497	TOTAL					6.987.226.497

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas :

1. Penguatan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing, dengan indikator Pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas
2. Penyederhanaan Birokrasi, dengan indikator Peningkatan Budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat sejak usia dini yang menguasai IPTEK dan talenta-talenta global.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan.

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2022
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pembinaan Perpustakaan	Ds. Mojowiryo, Kec. Kemlagi		20.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto didasarkan pada pencapaian prioritas nasional, Renstra Perpustakaan Nasional, Renstra Arsip Nasional, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, RPJMD/RPJPD, Renstra Disperka Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto didasarkan pada kebijakan nasional terangkum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Bidang Perpustakaan

- a. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan perpustakaan menjadi pusat belajar, berkegiatan, berketerampilan, berkreasi dan berekreasi;
- d. Pembinaan semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka sinergi kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan termasuk pelestarian koleksi lokal Kabupaten Mojokerto;

2. Kebijakan Bidang Kearsipan

- a. Membangun sistem kearsipan yang komprehensif pada semua instansi guna menciptakan akuntabilitas tata kelola kearsipan;
- b. Menyusun pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi tata kelola kearsipan;

- c. Pengembangan sistem kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuju sistem kearsipan digital;
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata kelola kearsipan;
- e. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna dari semua instansi;
- f. Meningkatkan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan kearsipan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan**

Tujuan dan Sasaran Renja PD disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah **misi ketiga.**

Selanjutnya pada tabel dibawah ini digambarkan secara jelas tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	
				2021	2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82%	84%
2.		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	61
3.		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	78%	79%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan
2. Nilai IKM Pelayanan Kearsipan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan Tahun 2022 telah disusun dan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto yaitu 4 Program dan 11 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.011.926.497,- (Enam Milyar Sebelas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari APBD Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- a.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d.1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d.2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d.3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d.4) Penyediaan Bahan/Material
 - d.5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - e.2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
 - f.2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f.4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. Program Pembinaan Perpustakaan

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota
 - a.1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - a.2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a.3) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a.4) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - a.5) Pengembangan Bahan Pustaka
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b.1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- b.2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b.3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- b.4) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- b.5) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Pengelolaan Arsip

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a.1) Penciptaan dan Penggunaan arsip Dinamis
 - a.2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

- a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.
 - a.1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) tahun.

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
(TABEL TC-33 dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
							APBD	APBD Prov	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Disperka	82,02%	4.956.956.497	APBD	-	-	-	82,72%	5.211.814.451
	2.23.01.2	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Disperka	94%	15.000.000	APBD	-	-		94%	12.500.000
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Disperka	3 Dokumen	7.500.000	APBD	-	-		3 Dokumen	7.500.000
	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Disperka	7 Dokumen	7.500.000	APBD	-	-		7 Dokumen	5.000.000
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Disperka	90%	4.402.344.097	APBD	-	-		90%	4.402.344.097
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji	Disperka	12 bulan	4.393.844.097	APBD	-	-		12 bulan	4.393.844.097

			dan tunjangan ASN									
	2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrai Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang disusun	Disperka	7 Laporan	8.500.000	APBD	-	-		7 Laporan	8.500.000
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Disperka	75,09	12.150.000	APBD	-	-		75,59	12.250.000
	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Disperka	30 Orang	12.150.000	APBD	-	-		30 Orang	12.250.000
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Disperka	90%	167.500.000	APBD	-	-		90%	182.500.000
	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Disperka	12 bulan	75.000.000	APBD	-	-		12 bulan	90.000.000
	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Disperka	12 bulan	25.000.000	APBD	-	-		12 bulan	25.000.000
	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperka	12 bulan	7.500.000	APBD	-	-		12 bulan	7.500.000

	2.23.01.2.06 .07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah waktu penyediaan ATK	Disperka	12 bulan	35.000.000	APBD	-	-		12 bulan	35.000.000
	2.23.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperka	12 bulan	25.000.000	APBD	-	-		12 bulan	25.000.000
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Disperka	86%	225.262.400	APBD	-	-		86%	306.220.354
	2.23.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disperka	12 bulan	160.262.400	APBD	-	-		12 bulan	161.220.354
	2.23.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Disperka	5 Orang	65.000.000	APBD	-	-		5 Orang	145.000.000
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Disperka	90%	110.000.000	APBD	-	-		90%	296.000.000
	2.23.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan BBM, Servis, ganti suku cadang kendaraan dinas	Disperka	12 bulan	15.300.000	APBD	-	-		12 bulan	45.000.000
	2.23.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	Jumlah waktu Perpanjangan	Disperka	12 bulan	35.700.000	APBD	-	-		12 bulan	11.000.000

		Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional									
	2.23.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Disperka	12 bulan	36.000.000	APBD	-	-		12 bulan	200.000.000
	2.23.01.2.09 .10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Disperka	12 Bulan	23.000.000	APBD	-	-		12 Bulan	40.000.000
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Indeks Kegemaran Membaca	Disperka	1. 11 2. 40,5%	917.470.000	APBD	-	APBN		1. 12 2. 41%	560.000.000
	2.23.02.2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Buku yang dibeli 2. Jumlah peserta 3. Jumlah bahan pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka	Disperka	1. 1.000 e-book/ eksempla 2. 100 Orang 3. 20 eksemplar	539.970.000	APBD	-	-		1.1.000 e-book/ eksempla 2. 100 Orang 3. 20 eksemplar	220.000.000
	2.23.02.2.01 .01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1. Jumlah Buku yang dibeli 2. TIK Layanan	Disperka	1. 1000 e-book 2. 1 paket	314.970.000	APBD	-	APBN		1000 e-book	55.000.000

			Perpustakaan									
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang disusun	Disperka	1 Laporan	40.000.000	APBD	-	-		1 Laporan	40.000.000	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka	Disperka	20 Eksemplar	25.000.000	APBD	-	-		20 Eksemplar	25.000.000	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah peserta yang mengikuti	Disperka	100 Orang	60.000.000	APBD	-	-		100 Orang	50.000.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku yang dibeli	Disperka	1000 Eksemplar	45.000.000	APBD	-	-		1000 Eksemplar	50.000.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Disperka	15 kali	377.500.000	APBD	-	-		15 kali	340.000.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah lokasi & Jumlah Peserta	Disperka	75 Lokasi, 75 peserta	122.500.000	APBD	-	-		75 Lokasi, 75 peserta	85.000.000	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa penerima bantuan	Disperka	2 Desa	45.000.000	APBD	-	-		2 Desa	45.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta lomba	Disperka	125 Orang	100.000.000	APBD	-	-		125 Orang	100.000.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta kegiatan	Disperka	240 Orang	60.000.000	APBD	-	-		300 Orang	60.000.000	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Lomba Duta	Disperka	50 Orang	50.000.000	APBD	-	-		75 Orang	50.000.000	

			Baca									
3.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Disperka	50%	107.500.000	APBD	-	-		50%	142.500.000
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	Disperka	5 OPD	80.000.000	APBD	-	-		5 OPD	80.000.000
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Lembaga yang dimonitoring	Disperka	25 OPD	30.000.000	APBD	-	-		25 OPD	30.000.000
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD	Disperka	5 OPD	50.000.000	APBD	-	-		5 OPD	50.000.000
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Disperka	5 OPD	27.500.000	APBD	-	-		5 OPD	27.500.000
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas yang dipelihara	Disperka	2500 berkas	27.500.000	APBD	-	-		2500 berkas	27.500.000
4.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Disperka	3 peraturan	30.000.000	APBD	-	-		3 peraturan	30.000.000
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Disperka	3 peraturan	30.000.000	APBD	-	-		3 peraturan	30.000.000

	2.24.03.2.01 .01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Disperka	3 peraturan	30.000.000	APBD	-	-		3 peraturan	30.000.000
JUMLAH TOTAL						6.011.926.497						

BAB IV

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan rencana program kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UP	B / L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/D AK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,02	Dispe rka	4.956.956.497		-		-	
	2.23.01.2	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		94%		15.000.000					
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen		3 Dokumen	Dispe rka	7.500.000					
	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen		7 Dokumen	Dispe rka	7.500.000					
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.402.344.097					
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah waktu penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		12 bulan	Dispe rka	4.393.844.097					
		Penyediaan Administrai			Jumlah laporan		7 Laporan	Dispe	8.500.000					

	2.23.01.2.02 .02	Pelaksanaan Tugas ASN			yang disusun			rka					
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah		75%		12.150.000				
	2.23.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli		30 Orang	Dispe rka	12.150.000				
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		90%		167.500.000				
	2.23.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli		12 bulan	Dispe rka	75.000.000				
	2.23.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman		12 bulan	Dispe rka	25.000.000				
	2.23.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		12 bulan	Dispe rka	7.500.000				
	2.23.01.2.06 .07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah waktu penyediaan ATK		12 bulan	Dispe rka	35.000.000				
	2.23.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	Dispe rka	25.000.000				
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase Penyediaan Jasa		86%		225.262.400				

		Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan									
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	Dispe rka	160.262.400					
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		5 Orang	Dispe rka	65.000.000					
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		90%		134.700.000					
	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah waktu penyediaan BBM, Servis, ganti suku cadang kendaraan dinas		12 bulan	Dispe rka	40.000.000					
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah waktu Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		12 bulan	Dispe rka	35.700.000					
	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah waktu pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya		12 bulan	Dispe rka	36.000.000					
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi		Jumlah waktu		12 bulan	Dispe	23.000.000					

	.10	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya			rka						
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2. Indeks Kegemaran Membaca	1. 11 2. 40,5%	Dispe rka	617.500.000					299.970.000
	2.23.02.2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1. Jumlah Buku yang dibeli 2. Jumlah peserta 3. Jumlah bahan pustaka local dan perbaikan bahan pustaka		1. 1.000 e-book/ eksempla 2. 100 Orang 3. 20 eksemplar		240.000.000					299.970.000
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			1. Jumlah Buku yang dibeli 2. TIK Layanan Perpustakaan		1. 1000 e-book 2. 1 paket	Dispe rka	70.000.000					299.970.000
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan yang disusun		1 Laporan	Dispe rka	40.000.000					
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Bahan Pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka		20 Eksemplar	Dispe rka	25.000.000					
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah			Jumlah peserta yang mengikuti		100 Orang	Dispe rka	60.000.000					

		Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan											
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka			Jumlah buku yang dibeli		1000 Eksemplar	Dispe rka	45.000.000				
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca		15 kali		377.500.000				
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat			Jumlah lokasi & Jumlah Peserta		75 Lokasi, 75 peserta	Dispe rka	122.500.000				
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah desa penerima bantuan		2 Desa	Dispe rka	45.000.000				
	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Jumlah peserta lomba		125 Orang	Dispe rka	100.000.000				
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah peserta kegiatan		240 Orang	Dispe rka	60.000.000				
	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah peserta Lomba Duta Baca		50 Orang	Dispe rka	50.000.000				
3.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Tingkat ketersediaan arsip sebagai	50%	Dispe rka	107.500.000				

					bahan akuntabilitas kinerja								
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	Dispe rka	80.000.000					
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Jumlah Lembaga yang dimonitoring	25 OPD	Dispe rka	30.000.000					
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah OPD	5 OPD	Dispe rka	50.000.000					
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga kearsipan Daerah	5 OPD	Dispe rka	27.500.000					
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Jumlah berkas yang dipelihara	2500 berkas	Dispe rka	27.500.000					
4.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				53%	Dispe rka	30.000.000					
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah			Jumlah produk hukum yang	3 peraturan	Dispe rka	30.000.000					

		Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			ditetapkan								
	2.24.03.2.01.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			Jumlah produk hukum yang ditetapkan		3 peraturan	Disperka	30.000.000				
JUMLAH TOTAL									5.711.956.497				299.970.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Dengan adanya Renja Tahun 2022 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sasaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Mojokerto, Agustus 2021
Pit. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19721026 199201 1 002